

MENGHUBUNGKAN KETAHANAN HAYATI DENGAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI INDONESIA:

Menuju Strategi Komunikasi yang Lebih Efektif dalam Pembangunan

Oleh: Petrarca Karetji¹

This paper seeks to present a multiparadigmatic approach to development in Indonesia using biosecurity and community development as examples of how priorities and agendas of different development groups or communities can be inter-linked in order to meet the expectations and perspectives of each group jointly. This differs from a single paradigm approach which professes to be inclusive, but in actual fact is oriented towards reaching the objectives and output which serve only one perspective, i.e. that of the funder or planner.

The paper serves to emphasize the importance of communication strategies not as a one way process of "enlightenment" from providers to beneficiaries, but as multidimensional processes of knowledge recognition and exchange. This includes support towards internal rationalization and effective negotiation between stakeholders.

Here it is argued that it is not only important to be aware of the existence of a variety of paradigms shaping the way different development communities interact. More important is to build an appreciation between development communities that each of these paradigms hold true for their respective communities and linking between paradigms rather than forcing context based rationale to follow broader, unbound rationalities.

This paper is far from being a complete work but insteads seeks to encourage further studies and exploration in order to develop more effective and democratic communication strategies. As thoughts originally presented as a seminal paper, it is hoped that the ideas presented can be further elaborated and strengthened with input and perspectives from more Indonesian as well as global experiences.

Keywords: Ketahanan hayati, Pemangku kepentingan, Peran masyarakat

Pendahuluan

Untuk negara seperti Indonesia, isu ketahanan hayati² belum dilihat tidak saja sebagai strategi perlindungan keragaman hayati di negara kepulauan yang besar

¹ Penulis mengucapkan terimakasih untuk masukan yang diberikan oleh Associate Prof. Michael Christie dan Prof. Ian Falk. Wawasan dan komentar yang sangat berarti juga telah diberikan oleh anggota dari Pusat Studi Untuk Kawasan Indonesia Timur Universitas Kristen Satya Wacana (M. Ndoen, D. Manongga, F. Karwur, T. Litaay, R. Siahianenia, D. Zacharias and D. Palekahelu).

² Dalam konteks ini, "ketahanan hayati" digunakan oleh penulis sebagai istilah deskriptif untuk menjelaskan "perlindungan" atau "mengamankan keragaman hayati" di dalam kepulauan Indonesia. Kami menjadi sadar bahwa keragaman hayati juga seringkali digunakan sebagai istilah untuk menunjukkan program perlindungan (contohnya program karantina pada daerah perbatasan negara).

ini, tapi juga sebagai pendekatan strategis untuk membangun stabilitas ekonomi dan politik jangka panjang. Indonesia adalah salah satu dari negara-negara yang pertama kali menandatangani *Convention of Biological Diversity* (Agustus 1994)³ dan yang serius terhadap isu ini dengan programnya yang bernama Rencana Kerja Nasional Keragaman Hayati Nasional⁴. Namun demikian Indonesia mempunyai catatan buruk dalam hal memelihara dan melindungi sumber-sumber alamnya. Judul Laporan Bank Dunia mengenai lingkungan Indonesia sesuai dengan kondisi sebenarnya yaitu: "Megadiversity Country with a Mega Crisis⁵" (Keragaman Hayati yang Sangat Besar dengan Krisis Sangat Besar). Menurut laporan ini Indonesia adalah negara dengan keragaman hayati terbesar di dunia namun keragaman hayati yang sangat besar atau "megadiversity" ini menghadapi sebuah "mega krisis" yang faktor utamanya adalah musnahnya habitat sehingga menyebabkan berkurangnya populasi tanaman dan hewan. Sebuah artikel Kompas⁶ tanggal 4 Mei 2007 memberitakan Indonesia sebagai negara dengan tingkat penggundulan hutan tertinggi di dunia (*Courtesy of the Guinness Book of World Records*) yaitu 2% per tahun atau 51 km persegi per hari.

Di sini dengan jelas terlihat adanya ketidakcocokan antara program pemerintah dan prinsip-prinsip konvensi internasional yang dianut Indonesia dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Inkonsistensi ini harus benar-benar dihentikan jika Indonesia ingin membangun sebuah program ketahanan hayati (yang ber-

pengaruh pada ketahanan pangan) di Indonesia. Tulisan ini menekankan pada perbedaan paradigma-paradigma pembangunan yang mempengaruhi arah dan agenda para pemangku kepentingan dan penggerak pembangunan di Indonesia, dan bagaimana paradigma-paradigma ini dimengerti dengan baik sehingga dapat digunakan untuk menangani masalah-masalah lingkungan di negara ini dengan efektif.

Pelaksanaan yang buruk terhadap sistem-sistem ketahanan hayati yang telah disetujui bersama di era Orde Baru dengan sistem pemerintahan sentralistik adalah sebuah contoh buruk dimana Indonesia tidak mampu melindungi keragaman hayatinya. Sangat banyak ragam jenis tanaman yang telah punah. Peran masyarakat adalah sangat penting jika Indonesia ingin melindungi kekayaan hayatinya. Tulisan ini melihat bagaimana pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat⁷ digunakan untuk mensosialisasikan pentingnya ketahanan hayati kepada masyarakat dan pada saat yang sama memanfaatkan pengetahuan lokal yang berhubungan dengan masalah ini. Para fasilitator juga merupakan faktor penting yang berperan sebagai penghubung pengetahuan lokal dan pengetahuan modern (pemerintah dan ilmuwan). Tulisan ini juga melihat mengapa hal ini penting jika Indonesia ingin membangun ekonomi yang berdasarkan ilmu pengetahuan dengan mengandalkan kebijaksanaan ketahanan hayati yang kuat dan efektif.

Tinjauan Pustaka

Sebuah studi oleh Sardan (2005: 53) tentang interaksi antara paradigma-paradigma pembangunan menyatakan ".....masalah mengenai artikulasi antara level seperti 'makro/struktur' dan 'strategi-strategi mikro/

³Menurut Laporan Bank Dunia-"Indonesia, Pengelolaan Lingkungan Pada Masa Transisi) http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2001/11/28/000094946_01110804163281/endered/PDF/multi0page.pdf

⁴<http://www.bappenas.go.id/index.php?odule=ContentExpress&func=display&ccid=827&meid=>

⁵ Sama dengan catatan kaki no.4

⁶ Surat Kabar Terkemuka di Indonesia

⁷ Informasi dalam program ini, disebut dengan PNPM - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, dapat diakses melalui http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=47

sosial' masih terbuka lebar....." dan dari sinilah tulisan ini akan membicarakan strategi-strategi dan struktur-struktur di Indonesia yang mempengaruhi pembangunan di negara ini. Strategi dan struktur ini terutama dipengaruhi oleh komunikasi yang terjadi di dalam setiap level dan antar level. Oleh karena itu peningkatan efektivitas dalam proses komunikasi harus mendukung peningkatan efektivitas interaksi antar level. Kita dapat menghubungkannya dengan teori Habermas tentang tindakan komunikatif dalam konteks pembangunan Indonesia di mana efektivitas proses negosiasi dan rasionalisasi antara penggerak pembangunan akan mempengaruhi efektivitas proses pembangunan yang akan dilaksanakan. Komponen-komponen tindakan komunikatif ini dapat juga dihubungkan dengan pendekatan dan teori *discourse analysis* di mana proses pembangunan di Indonesia bangkit melalui komunikasi antar penggerak pembangunan.

Dalam *Development as Freedom*, Amartya Sen menyimpulkan bahwa pembangunan strategis bukan lagi dilihat sebagai proses yang sederhana (Sen, 1999). Dengan tiga kata "*Development as Freedom*" Sen mengembangkan konsepnya untuk menggambarkan banyaknya elemen yang secara terus-menerus harus dipertimbangkan dan digali untuk melaksanakan pembangunan yang berarti. Sayangnya, hampir semua akademisi melihat penelitian sebagai sebuah konsep yang justru sering menambah masalah yang sudah ada dalam pembangunan. Konsep dan kenyataan empiris cenderung terlalu menyederhanakan realita dalam proses pembangunan yang menjadi ajang para ilmuwan untuk membuktikan 'kebenaran' teori dan disertasi yang membentuk sebuah konsep yang sudah dikembangkan. Namun konsep-konsep ini hanya benar bila segala sesuatunya bersifat konstan. Ini adalah sebuah kondisi yang jarang ditemukan dalam pembangunan.

Hasilnya para pekerja lapangan ditempatkan di level yang berbeda-beda. Pendekatan teoritis mengenai

penggerak pembangunan seperti yang ditawarkan oleh Mosse dan Lewis dalam buku mereka "*Development Brokers and Translators: The Ethnography of Aid and Agencies*" berfokus pada individu sebagai "pekerja sosial yang secara aktif membangun peran sosial, politik dan ekonomi sebagai hasil dari kelemahan negara dalam menekankan rasionalitas di suatu daerah dan dalam menjalankan program bapak asuh untuk mengurangi kebingungan intervensi dan kontrol pemerintah" (2006: 11). Mosse dan Lewis juga membahas *development brokers*, yang secara umum dilihat sebagai jembatan antara *developers* (pemilik modal dan pemerintah) dan masyarakat (2006, 13). Semua pihak yang terlibat dalam pembangunan mempunyai interpretasi yang bersifat "*performative*" karena mereka cenderung untuk menciptakan dunia sesuai dengan perspektif mereka tentang dunia Latour, 1996:194-195). Oleh karena itu penelitian terhadap para developer dan cara kerja mereka sangat penting karena perspektif merekalah yang mempengaruhi implementasi pembangunan di Indonesia. Meskipun telah banyak penelitian dilakukan terhadap praktisi pembangunan seperti yang dinyatakan oleh King (2004):

... Kurangnya daya kritis yang berkesinambungan terhadap sistem pembangunan baru di negara-negara Selatan mengakibatkan kurangnya evaluasi atau pengawasan terhadap program-program pembangunan yang telah disetujui bersama. Oleh karena itu sangatlah penting bagi para ilmuwan dan pemikir di negara-negara Selatan untuk berperan aktif di semua sektor pembangunan dari skala terkecil sampai skala terbesar dengan pengetahuan dan kemampuan yang mereka miliki ...

Ini adalah tanggungjawab para peneliti Indonesia untuk terus kritis terhadap struktur pembangunan Indonesia. Sejauh ini organisasi internasional yang membantu Indonesia belum cukup "tertantang" untuk meningkatkan kesadaran bahwa perkembangan pengetahuan yang diekspresikan

dalam proyek-proyek pembangunan bukan saja milik pemerintah, ilmuwan, atau organisasi internasional tapi juga muncul, dan oleh karenanya milik masyarakat lokal. Ini adalah area untuk pengembangan teori dan penelitian lebih lanjut.

Jorgensen dan Phillips (2004:60) mengutip Barret (1991) menyatakan bahwa, hegemony "adalah sebuah proses yang digunakan untuk menciptakan kesadaran yang rendah tanpa usaha untuk membantu mengurangi tindakan kekerasan dan paksaan". Menurut teori ini, penggunaan istilah-istilah dalam pembangunan seperti 'good governance', 'gender mainstreaming' dan 'indigenous peoples' menciptakan perbedaan antara mereka yang mengerti akan istilah-istilah tersebut dan mampu menggunakannya dengan benar dalam komunikasi dan mereka yang tidak. Istilah-istilah ini harus dijadikan tujuan bukan hanya sekedar didiskusikan untuk mendapat pengertian bersama akan arti istilah-istilah tersebut. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut penggunaan komunikasi dalam pembangunan dan bagaimana ilmu baru ini diteliti secara epistemologis atau bagaimana ilmu ini digunakan sepenuhnya dalam pembangunan sehingga menjadi "mekanisme kekuatan" (Foucault, 1977:102) yang lebih bersifat ideologis daripada peraturan-peraturan yang berasal dari norma-norma (Foucault, 1997:106). Menurut Laclau dan Mouffe, "ini menciptakan sebuah kelompok dalam proses politik yang menjadi topik wacana" (Jorgensen & Phillips, 2004:62). Ini juga menjadi subjek target pembangunan yang diatur oleh peraturan-peraturan yang berasal dari "kedaulatan" penyandang dana dan dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan dan hasil yang bisa diukur seperti jumlah partisipasi minimum wanita dalam sebuah pertemuan. Peraturan-peraturan ini sering diterapkan tanpa mempertimbangkan norma-norma lokal untuk menentukan waktu dan kondisi-kondisi sebuah pertemuan yang menjamin partisipasi wanita yang lebih berarti dalam konteks atau masyarakat yang berbeda-beda.

Menurut sudut pandang ini, kebutuhan untuk mencapai pemecahan masalah bersama dalam setiap proses pembangunan, sebagaimana yang diartikan oleh Todarro, semakin lama semakin sulit untuk dicapai karena istilah-istilah pembangunan selalu berubah dengan istilah-istilah atau jargon-jargon baru. Siapa saja yang ingin terlibat dalam pembangunan di Indonesia akan segera masuk dalam jebakan istilah yang telah diciptakan oleh lembaga-lembaga internasional dan diterjemahkan serta digunakan oleh lembaga-lembaga nasional dengan berbagai macam terminologi dan akronim. Contohnya istilah 'good governance' diterjemahkan 'tata pemerintahan yang baik' sementara yang lain menggunakan istilah 'governansi'⁸ untuk mengganti kata 'pemerintahan'⁹ dalam Bahasa Indonesia. Dalam situasi lain ada yang tidak menerjemahkan istilah ini sama sekali dengan menggunakan istilah Inggris. 'Gender Mainstreaming' kadang-kadang diterjemahkan 'pengarus-utamaan jender' yang bahkan mungkin terdengar asing bagi kebanyakan orang Indonesia yang sama asingnya bagi orang yang tidak berbahasa Indonesia. Diperlukan banyak kerja lanjutan untuk benar-benar mengerti apa yang dimaksud istilah tersebut secara semantik dan mencari istilah lokal yang mungkin mempunyai padanan kata yang lebih tepat, seperti yang telah dilakukan misalnya oleh Christie dan Greatorex (2006) terhadap suku Aborigin Yolgnu (Northern Territory, Australia). Mereka membandingkan persepsi dan konstruksi modal sosial dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada di suku ini. Bagaimana pun juga jargon-jargon atau istilah-istilah pembangunan yang menentukan seseorang "diterima, ditolak dan dinegosiasikan dalam proses komunikasi" (Jorgensen & Phillips, 2004:82). Hal ini menggambarkan bagaimana seseorang bisa diterima (atau dikucilkan) dalam pembangunan. Bagi

⁸Lihat [http://www.gtzsfdm.or.id/documents/dec_ind/o_pa_doc/Penjelasan kesepakatan.pdf](http://www.gtzsfdm.or.id/documents/dec_ind/o_pa_doc/Penjelasan%20kesepakatan.pdf)

⁹Lihat http://mudrajad.com/upload/strategic-management/lectures_9_corporate%20governance.pdf

masyarakat lokal di Indonesia untuk dapat diterima dalam pembangunan dibutuhkan proses negosiasi untuk "memperkenalkan" dan menghubungkan norma-norma dan kebiasaan dengan prinsip-prinsip internasional. Contohnya di suku Bugis¹⁰-Sulawesi Selatan ada istilah "*Taro ada, Taro gau*"¹¹ yang arti harafiahnya adalah "tempat kata, tempat tindakan" yang berarti "yang dikatakan harus dilakukan", sebuah norma lokal yang mempunyai arti sama dengan istilah "akuntabilitas", sebuah konsep yang cukup baru yang harus dicapai jika Indonesia ingin mencapai "*good governance*" (istilah ini juga berlaku bagi pemangku kepentingan lokal). Maka pengakuan yang lebih besar terhadap norma-norma lokal melalui penelitian-penelitian lebih lanjut dapat memperkaya konsep-konsep yang sudah ada untuk digunakan dalam komunikasi pembangunan.

Situasi komunikasi yang muncul dalam kelompok tertentu melalui pedoman dan bentuk konsep-konsep akan melahirkan paradigma-paradigma pembangunan. Chambers menjelaskan paradigma pembangunan sebagai: "sebuah pola koheren dan saling mendukung dari konsep-konsep, nilai-nilai, metode-metode dan tindakan untuk penerapan yang luas"¹² (Chambers 1994: 2). Dalam artikelnya Chambers berpendapat bahwa ada paradigma-paradigma pembangunan baru yang mempunyai 4 level interaksi, yaitu menjadi: 1) normatif, 2) konseptual, 3) empiris dan 4) praktis. Melalui paradigma baru ini Chambers mencoba untuk mengubah 'profesio-

nalisme normal' menjadi 'profesionalisme baru' di mana kekuatan hubungan diubah sehingga:

... meletakkan 'profesionalisme baru' di pemilihan klien, nilai-nilai profesionalisme, metode penelitian dan peran. Klien untuk 'profesionalisme baru' adalah mereka yang miskin dan terpinggirkan. Nilai-nilai profesionalisme dirubah menjadi nilai-nilai yang mengutamakan modernisasi teknologi. Usaha-usaha dilakukan untuk membuat penelitian dan metodologi yang lebih menyeluruh dan lebih banyak melakukan percobaan di lapangan. Peran bahkan diubah sehingga masyarakat miskin menjadi guru dan penguji coba. Evaluasi bukan dilakukan oleh sesama ilmuwan atau penyuluh namun oleh klien itu sendiri.

Chambers menyimpulkan bahwa paradigma baru ini selain merujuk pada pembangunan pedesaan pada level makro dapat juga berguna bagi hubungan antar negara, perdagangan dan mengatur bantuan organisasi internasional. Pemikiran yang melatarbelakangi paradigma pembangunan dan profesionalisme baru berdasarkan pada asumsi bahwa para pemangku kepentingan pembangunan di semua level harus mengubah cara kerja mereka menjadi cara kerja *bottom-up* dengan mengutamakan mereka yang sebelumnya terpinggirkan oleh proses pembangunan. Ide ini ideal bagi Chambers namun sangat sulit untuk dicapai melihat kenyataan yang ada yaitu setiap kelompok pemangku kepentingan pembangunan di tataran komunikasi beroperasi di level yang berbeda dengan minat dan orientasi yang berbeda pula. Namun jika kita bisa menerima bahwa strategi epistemologis dapat menjadi kunci peningkatan efektifitas usaha-usaha pembangunan, maka hal ini bisa mendorong eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana agen-agen pembangunan nasional dan internasional dapat bekerja sama dengan masyarakat yang mempunyai pengetahuan lokal. Penelitian secara spesifik mencoba untuk menghubungkan dan menegosiasikan

¹⁰Sebuah suku yang jumlahnya mencapai lebih dari 3,5 juta jiwa sesuai dengan SIL ethnologue yang besar dari Sulawesi Selatan (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=bug)

¹¹Didapatkan dari rekaman wawancara dengan Rashid dan Nursyamsul, Makassar, 18 Oktober. 2007

¹²Definisi ini berbeda dari definisi Kuhn tentang paradigma "Pencapaian ilmiah yang dapat diterima universal adalah saat tersedianya penemuan model masalah dan solusinya untuk pelaksana pembangunan masyarakat" (Kuhn 1962:x)

norma-norma lokal dengan tujuan-tujuan nasional dan internasional untuk meningkatkan kesejahteraan (secara implisit produktivitas) masyarakat.

Minat dan orientasi kelompok-kelompok pemangku kepentingan pembangunan secara umum dapat dikategorikan pertama-tama dengan melihat definisi komunitas. Komunitas didefinisikan oleh Wilkinson dan dikutip oleh Prof. Ian Falk¹³ sebagai berikut:

Definisi sosiologis menekankan batasan-batasan interpersonal seperti pembagian teritori, kehidupan sehari-hari, kegiatan kolektif, dan persamaan jati diri. Hal yang sangat penting adalah interaksi sosial. Interaksi sosial berarti sebuah tempat untuk kegiatan bersama; sebagai tempat kegiatan bersama bagi masyarakat; memberikan struktur dan arahan tentang proses kegiatan bersama; dan sumber identitas masyarakat (Wilkinson 1991:13).

Menempatkan para pemangku kepentingan pembangunan bersama-sama dalam paradigma Chamber sulit dilakukan karena para penggerak pembangunan ini tidak bisa didefinisikan sebagai sebuah komunitas karena interaksi sosial mereka yang terbatas. Interaksi sosial dan elemen-elemen lain dalam komunitas sebagaimana yang didefinisikan oleh Wilkinson dapat terlihat hanya bila kita mengelompokkan para penggerak pembangunan ke dalam beberapa kategori seperti penggerak pembangunan lokal, nasional, dan internasional. Penggerak pembangunan di dalam ketiga komunitas ini mempunyai cara hidup yang sama, kegiatan kolektif dalam berusaha, dan tingkah laku di mana mereka menghindari perubahan dan menghubungkan diri dengan identitas bersama berdasarkan level yang sama dalam hal akses ke ilmu pengetahuan dan persepsi kebutuhan serta prioritas mereka.

Selain menjadi pemangku kepentingan pembangunan, setiap komunitas atau kelompok ini mengalami paradigma-paradigma pembangunan yang berbeda. Masing-masing komunitas mempunyai sistem dengan koherensi yang terbatas dan sebuah budaya dengan nilai-nilai, konsep-konsep, metode-metode dan kegiatan-kegiatan yang saling mendukung dan secara luas bisa diterapkan. Namun, integrasi ini dengan konsep-konsep, nilai-nilai, metode-metode dan kegiatan-kegiatannya belum tentu bisa diterapkan secara terpadu antar komunitas karena perbedaan-perbedaan mendasar komunitas tersebut. Penelitian telah menemukan bahwa ilmu pengetahuan barat dalam proyek-proyek pembangunan tidak memperhatikan pengetahuan dan kebijaksanaan lokal serta isu-isu *underdevelopment* dan cara menanganinya hanya berdasarkan pengetahuan dan referensi barat (Grillo, 1997: 3). Situasi ini menimbulkan anggapan bahwa Barat mendominasi praktik-praktik pembangunan. William Easterly sangat memperhatikan isu tentang bantuan dari organisasi internasional dalam sebuah artikel pada konferensi ketiga AFD/EUDN dengan tema "Bagaimana Menilai Kebutuhan Akan Bantuan? Jawabannya: Jangan bertanya".

Dalam tulisan ini Easterly memaparkan tentang penggunaan proses perencanaan dalam pemberian bantuan, plus strategi-strategi dan pola-pola yang akan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin yang hanya akan masuk akal jika mereka dilihat dengan sebuah 'perencanaan mental terpusat'. Easterly menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana berbagai macam teori dan model-model ekonomi seperti "*finacing gap*", "*poverty trap*" dan lain-lain masih terus digunakan meskipun model-model tersebut sudah lama dipertanyakan efektivitasnya sebagai alat untuk mengukur kebutuhan dan menganalisis kebijaksanaan dan kemiskinan. Easterly menekankan bahwa dengan bantuan internasional saja Tujuan Pembangunan Milenium tidak akan tercapai. Dia

¹³ Tulisan dipresentasikan pada CRLRA Seminar pada 30 Oktober 2000 dan dapat diakses pada <http://www.crlra.utas.edu.au/files/discussion/2001/D8-2001.pdf>

menyimpulkan bahwa proses-proses perencanaan harus dipelihara dengan baik dan dana harus diberikan kepada mereka yang produktif sedangkan dana harus dikurangi bagi program-program yang tidak efektif. Ketika hasil bantuan terlihat semakin jelas dan jumlah orang miskin berkurang, negara-negara 'kaya' akan meningkatkan dukungan terhadap program tersebut.

Sangatlah menarik untuk sekali lagi melihat analisis yang diberikan oleh Sen di bab 10 dalam *Development as Freedom* yang menekankan kapasitas pembangunan untuk menciptakan penggerak pembangunan yang 'bebas' untuk menentukan arah pembangunan dan peran mereka di dalam pembangunan. Pembahasan utamanya adalah tentang dominasi praktik-praktik Barat, terutama dari perspektif budaya. Kekuatan pertukaran ekonomi dan organisasi tenaga kerja sulit untuk dihindari dalam dunia kompetisi yang digerakkan oleh kemajuan teknologi dan mendominasi persaingan ekonomi. Ini bukanlah suatu masalah karena merupakan suatu keuntungan dari perdagangan global dan kesejahteraan ekonomi yang diberikan kepada suatu negara. Sen mengajukan sebuah bentuk globalisasi yang berusaha mengurangi dampak buruk terhadap sistem-sistem kerja dan produksi tradisional di mana perubahan terjadi secara terus-menerus. Perubahan ini terjadi melalui sebuah proses pelatihan dan kapasitas pembangunan dengan mengembangkan keterampilan baru. Proses ini dapat didukung dengan program-program jaringan keamanan sosial jangka pendek, terutama bagi mereka yang secara langsung terkena dampak negatif globalisasi. Yang mungkin akan membuat pendekatan Sen lebih masuk akal adalah jika ada proses-proses pelatihan dan kapasitas pembangunan untuk mempelajari, menerima dan memantapkan penerapan-penerapan pengetahuan yang berhubungan dengan tuntutan dunia yang semakin sadar akan pelestarian lingkungan.

Peningkatan "skills" atau kapasitas yang dipaparkan oleh Sen dapat

dilihat dari perspektif ekonomi dan budaya. Isu kedua sangat berbeda dengan isu pertama. Dalam perkembangan ekonomi dan teknologi banyak sistem-sistem lama ditinggalkan begitu saja dan diganti dengan sistem-sistem dan teknologi yang lebih efisien. Namun, karena sistem-sistem lama dan tradisi ditinggalkan kemungkinan ada rasa kecemasan dan rasa sedih. Oleh karena itu setiap komunitas harus bisa (mempunyai kepercayaan diri yang cukup) untuk menentukan aspek-aspek tradisi yang harus mereka pelihara meskipun mungkin akan menanggung biaya ekonomi yang lebih tinggi. Ini membawa kita kembali ke masalah kapasitas. Keputusan untuk memelihara atau meninggalkan sistem-sistem tradisional harus didiskusikan bersama-sama, paling tidak sejauh semua kelompok dalam komunitas terwakili dan perwakilannya bebas berpendapat untuk membicarakan dan membuat keputusan bersama tentang aspek-aspek tradisional mana yang harus ditinggalkan atau harus dipelihara. Sen berpendapat bahwa kapasitas pembangunan sangat penting untuk mengerti budaya-budaya yang saling mempengaruhi untuk mengambil sisi positif dari kebudayaan atau negara lain. Kapasitas untuk saling mengerti dan menghargai akan produk-produk budaya adalah hal yang sangat penting. Penjelasan Sen tentang kriteria dan arti dalam memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam pembangunan adalah sebuah hasil dari perjuangan dan pembebasan selama bertahun-tahun, bekerja dalam organisasi-organisasi pembangunan internasional. Pandangan yang lengkap seperti ini bisa ditanggapi dengan beberapa pandangan skeptis, karena tidak mungkin semua kriteria bisa dipenuhi. Namun Sen menekankan bahwa proses pembangunan tidak boleh dibebankan hanya kepada satu atau dua kelompok penggerak pembangunan. Pembangunan adalah tanggungjawab semua penggerak pembangunan dan dapat dicapai jika setiap individu terlibat secara aktif. Mereka yang terlibat dalam pembangunan hanya bisa terlibat secara aktif jika

mereka diberikan kapasitas dasar yang diperlukan (Sen 1999).

Jika pembangunan adalah tanggungjawab semua penggerak pembangunan, apakah mereka mempunyai satu pandangan tentang apa pembangunan itu dan pembangunan jenis apa yang mereka inginkan? Dalam tulisan sebelumnya¹⁴ saya menggambarkan contoh perbedaan-perbedaan persepsi dengan cerita di mana spesialis pembangunan masyarakat di Papua bertemu secara kebetulan dengan nelayan lokal yang sedang beristirahat di pantai. Sering kita tidak menjelaskan arti kata yang sering dipakai, misalnya kata 'pembangunan' karena lupa bahwa belum tentu semua pelaku yang berinteraksi mempunyai pandangan yang sama tentang maksud istilah pembangunan. Meskipun ini kelihatannya sepele, ada banyak contoh investasi-investasi untuk proyek-proyek yang tidak dapat mempertahankan kinerjanya setelah proyek-proyek itu berjalan. Merupakan hal yang menarik untuk melihat beberapa hal dari kasus-kasus ini yang terjadi akibat lemahnya strategi komunikasi atau "sosialisasi" dan penyebarluasan atau proses-proses awal sebuah proyek. Pertanyaannya adalah dalam hal apa proses-proses ini (juga proses perencanaan) lebih berfokus pada kepentingan untuk "mengajar" pemangku kepentingan lokal daripada berfokus pada kepentingan untuk menjembatani pengertian yang didasari oleh pembelajaran terminologi istilah-istilah dan norma-norma lokal yang berhubungan dengan tujuan-tujuan sebuah proyek.

Dalam hal ini pemikiran Ricoeur tentang dialektika antara teks dan pembaca juga penting. Ricoeur (Valdes, 1991:8) melihat bahwa proses interpretasi teks adalah sebuah dialektis dinamis. Proses interpretasi dan level kesesuaian (pengertian) yang didapat oleh pembaca sangat relevan dalam

proses pembangunan bagi pekerja-pekerja bertaraf internasional yang sangat tergantung pada pembangunan teks. Namun jika fasilitator pembangunan masyarakat, contohnya, hanya membaca buku manual tanpa mengadakan proses penyesuaian¹⁵, bagaimana mereka bisa membangun pengertian terhadap pemangku kepentingan lokal? Oleh karena itu proses penyesuaian harus dilakukan. Di Indonesia pelatihan-pelatihan seperti ini untuk para fasilitator dikurangi agar menekan biaya¹⁶.

Ketika dialek antara pembaca dan teks terbuka untuk penyesuaian, pembaca akan mendapat suatu pengertian dan "sesuatu yang asing dapat dimengerti" (Valdes, 1991: 89). Ketika ada perbedaan pengertian, seseorang yang terlibat dalam pembangunan dan yang membaca sebuah teks diharapkan dapat benar-benar mengerti teks tersebut agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Idealnya, teks-teks yang disebar oleh lembaga-lembaga internasional dan dibaca oleh masyarakat internasional yang sedang membangun harus didiskusikan bersama oleh pemangku kepentingan nasional dan lokal. Di sisi lain, interpretasi yang salah bisa dan akan terjadi ketika sebuah teks dipresentasikan berdasarkan interpretasi satu pihak tanpa kesempatan untuk penyesuaian (Lewis & Mosse, 2006). Hal ini sekali lagi menunjukkan pentingnya proses interaksi antara pemangku kepentingan di Indonesia dan pentingnya kapasitas pembangunan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas interaksi-interaksi ini.

Meskipun ada berbagai macam tulisan mengenai etnografi pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan dari

¹⁵Sebuah isu yang biasa karena pelaksanaan pendidikan di Indonesia dimana guru masih menggunakan banyak metode hafalan

¹⁶ Sebuah program pengembangan masyarakat yang berkelanjutan dengan pelaksanaan 14 hari pelatihan dasar untuk menjadi fasilitator masyarakat dibandingkan dengan program yang lebih dahulu (dan efektif) selama 21 hari

¹⁴Diterbitkan oleh Jurnal Pengembangan dan Pengelolaan Pengetahuan *Knowledge Management for Development Journal* (Vol.1, No.3)

perspektif instrumental, populis dan dekonstruktif (Ed. Lewis & Mosse, 2006:2), umumnya tulisan-tulisan tersebut bersifat idealistik bukan metodologis dan masih diperlukan untuk "menganalisis interaksi ide-ide dan hubungan-hubungan dalam pembangunan" (Ed. Lewis & Mosse, 2006:5a). Dalam konteks kontemporer, ketika kerangka-kerangka referensi yang berbeda digunakan untuk menganalisis suatu peristiwa dapat terjadi sebuah perang interpretasi. Namun, sebuah pendekatan terhadap para pemangku kepentingan seperti yang dikembangkan oleh *Wageningen Agricultural University* (Ed. Grillo & Stirrat, 1997: 3) sangat bermanfaat dalam studi-studi tentang pembangunan. Fokus terhadap para pemangku kepentingan menjadi penting karena realita kompleks muncul dari masing-masing kelompok penggerak pembangunan. Metodologi harus bisa menciptakan "dunia harmonis" (Long 1992: 5) sehingga realita kompleks ini bisa dimengerti oleh semua orang. Di Indonesia, penelitian biasanya lebih berfokus pada komunikasi dalam komunitas dan penggerak pembangunan lokal sebagaimana yang terdapat dalam tulisan karya "orang luar" seperti Geertz's dalam karyanya "Kinship in Bali" (1975), Kuipers (1998).

Analisis wacana (*discourse analysis*) terhadap para penggerak pembangunan telah menjadi penting karena 'bahasa' yang digunakan dalam proses pembangunan sudah mempunyai perbendaharaan kata sendiri dengan area komunikasi dan konstruksi pengertian yang berbeda. Salah satu kesimpulan Kuipers adalah bahwa *discourse analysis* haruslah sebuah proses kerja sama antar semua level. Kuipers (1998: 149) berpendapat:

....bahasa berbeda, berubah, tumbuh, mengalami kemunduran dan meluas bukan karena "siklus alami kehidupan tapi karena cara ideologi linguistik dilakukan oleh pelaku yang tertarik dan mereka yang mempunyai kuasa terhadap ideologi tersebut dan menjembatani bentuk-bentuk struktur

linguistik dan hubungan-hubungan sosioekonomi.

Paradigma Pembangunan dan Ketahanan Hayati

Dalam membangun sebuah strategi untuk meningkatkan perhatian terhadap ketahanan hayati di Indonesia, pendataan terhadap perbedaan-perbedaan paradigma pembangunan, norma-norma dan kondisi-kondisi yang membentuk kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tujuan-tujuan pemangku kepentingan dalam setiap paradigma sangat bermanfaat. Hal ini bisa memberikan informasi berharga yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu kerangka pemikiran dan mungkin bisa menghasilkan strategi-strategi pembangunan yang perlu dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan pada level internasional, nasional dan lokal, khususnya yang berhubungan dengan ketahanan hayati. Pertimbangan terhadap agenda-agenda di setiap level sangat penting bila kita ingin membangun soliditas dan kerjasama antar pemangku kepentingan. Pendekatan ini bila digunakan untuk menjalankan program ketahanan hayati di Indonesia akan sangat berguna untuk menganalisis kegiatan komunikasi yang terjadi antar pemangku kepentingan, apakah kegiatan ini berjalan efektif dan apakah pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk membuat kegiatan ini efektif dan mudah dilaksanakan.

Di Indonesia kami lebih fokus terhadap isu-isu nyata yang berhubungan dengan ketahanan hayati, menggunakan statistik untuk menjelaskan mengapa kami harus melindungi lingkungan kami dan untuk menunjukkan jika hanya sedikit atau bahkan tidak ada kemajuan yang dicapai. Namun mungkin kita harus meningkatkan fokus kita terhadap isu-isu yang tidak begitu terlihat yang berhubungan dengan ketahanan hayati terutama pada elemen-elemen dasar dari "kekuatan, tujuan dan prinsip-prinsip masyarakat yang terlibat" (Pattel 2006: 62).

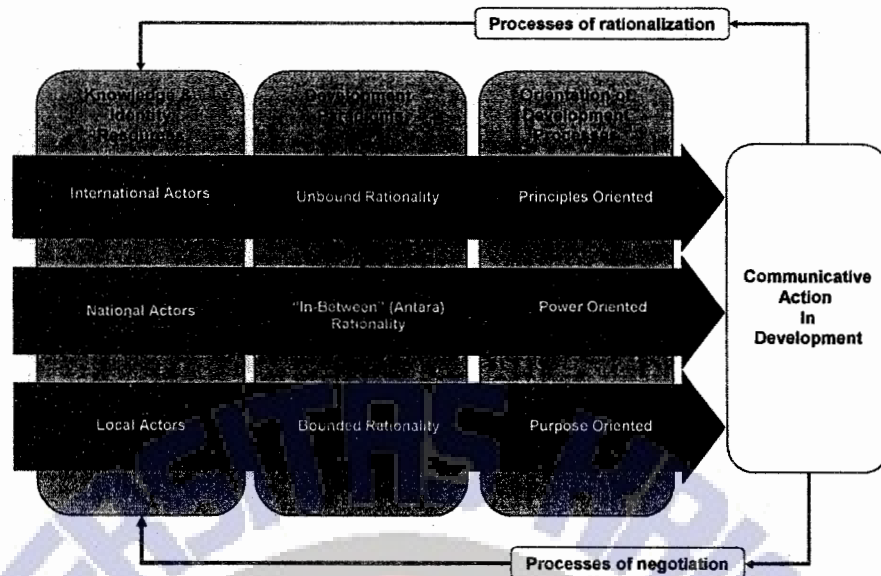


Diagram 1 menunjukkan interaksi antara tiga kelompok besar penggerak pembangunan di Indonesia. Dengan meminjam model-model modal sosial yang berfokus pada penduduk asli¹⁷, kami dapat menggunakan aspek-aspek identitas dan sumber-sumber pengetahuan terhadap masing-masing-masing komunitas dan kegiatan-kegiatan komunikasi¹⁸ untuk menemukan pilihan-pilihan yang bisa dipakai untuk interaksi antar kelompok yang lebih efektif. Dalam diagram ini kami mengidentifikasi tiga kelompok penggerak pembangunan internasional, nasional dan lokal. Setiap kelompok memiliki pengetahuan dan sumber-sumber identitasnya masing-masing yang merupakan komponen-komponen identitas setiap individu di kelompok-kelompok tersebut.

Kelompok penggerak pembangunan internasional mempunyai akses yang luas terhadap sumber-sumber pengetahuan. Biasanya mereka adalah organisasi-organisasi donor dan menjadi penghubung antar negara. Mereka bisa digambarkan sebagai sebuah kelompok di mana rasionalitas kolektifnya tidak terbatas oleh lokasi. Mereka

bisa menjadi anggota di "komunitas" mereka masing-masing tanpa harus menghubungkan kegiatan-kegiatan mereka dengan nilai-nilai dan masalah-masalah lokal. Orientasi paradigma pembangunan internasional umumnya adalah penggunaan prinsip-prinsip umum pembangunan di negara-negara yang berbeda. Meskipun pendonor mengklaim bahwa mereka sudah menyesuaikan pendekatan-pendekatan mereka dengan kondisi setempat, namun tujuan mereka adalah tetap menerapkan prinsip-prinsip umum pembangunan di situasi-situasi tertentu.

Kelompok kedua yaitu penggerak pembangunan nasional yang mempunyai identitas dan sumber-sumber pengetahuan yang cenderung kepada kepentingan-kepentingan negara mereka, dalam hal ini Indonesia. Keadaan individu mempengaruhi bagaimana mereka memposisikan peran mereka yang berada antara kepentingan Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara lain dan kepentingan kelompok mereka masing-masing. Hasilnya adalah sebuah paradigma yang lebih berorientasi kepada aspek-aspek dan elemen-elemen kekuasaan. Saya merujuk paradigma nasional sebagai *antara* karena individu dalam komunitas ini mengkombinasikan perspektif penggerak pembangunan

¹⁷Mengacu pada tulisan Ian Falk berjudul *Human and Social Capital: A Case Study of Conceptual Colonisation*

¹⁸Berdasarkan pada Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action*

lokal dan nasional yang bergerak menurut agenda politik kepemimpinan nasional dan kepentingan mereka masing-masing. Dalam komunitas ini pendidikan para tokoh-tokohnya semakin tinggi bahkan banyak yang lulusan luar negeri (yang mempengaruhi pandangan mereka), namun banyak juga di antara mereka yang dibesarkan dalam konteks lokal yang sadar dan bahkan merasa harus berpegang dan menggabungkan perspektif-perspektif lokal. Di sisi lain kepentingan individu untuk memelihara status dan tanggungjawab mereka di level nasional untuk memelihara kedaulatan Indonesia sering terlihat dalam perhatian kelompok-kelompok tertentu terhadap agenda-agenda negara-negara lain yang berpartisipasi dalam pembangunan di Indonesia. Karena situasi-situasi ini, paradigma ini merefleksikan dan memperjelas orientasi tokoh-tokoh nasional yaitu memelihara kekuasaan. Penelitian-penelitian terhadap komunitas ini juga bisa memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor tarik menarik yang mempengaruhi para tokoh ini di level nasional yang menghasilkan rasionalitas "antara".

Kelompok ketiga terdiri dari tokoh-tokoh pada level lokal dengan identitas dan sumber-sumber pengetahuan yang sesuai dan cukup dalam konteks lokal, namun mungkin belum bisa digunakan dalam konteks yang lebih luas. Hal ini sering membatasi rasionalitas tokoh-tokoh ini dalam konteks lokal. Keputusan-keputusan yang bersifat lokal mungkin terlihat irasional dan tidak efisien jika dipaksakan terhadap tokoh-tokoh dari luar konteks lokal. Rasionalitas terbatas ini menghasilkan sebuah paradigma pembangunan pada level lokal yang lebih berorientasi kepada proses-proses pembangunan yang secara cepat langsung dirasakan masyarakat.

Penjelasan ini memaparkan tiga paradigma pembangunan yang luas yang berjalan searah satu sama lain namun mungkin akan mengurangi efektivitas setiap proses pembangunan bila tidak dikomunikasikan dengan

baik. Contohnya komunitas pembangunan internasional ingin menjalankan sebuah "prinsip" pembangunan yaitu memelihara ketahanan hayati. Jika prinsip ini tidak menjelaskan manfaatnya terhadap masyarakat lokal (misalnya dengan menjelaskan mengapa masyarakat lokal bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan mereka), maka tidak akan ada kemajuan yang berarti. Ini bisa terjadi bahkan jika kelompok penggerak pembangunan nasional mendukung kelompok internasional tersebut karena pelaksanaan prinsip tersebut tidak berpengaruh pada struktur kekuatan yang ada, dan bahkan bisa membantu legitimasi posisi organisasi-organisasi nasional, misalnya melalui pengakuan internasional.

Di sisi lain ketika penggerak pembangunan lokal ingin meningkatkan pendapatan lokal jangka pendek dari sumber-sumber alam seperti kayu dan ikan, sering mendapat dukungan dari negara karena ini berarti meningkatkan pendapatan nasional. Namun prinsip-prinsip internasional mengenai pelestarian lingkungan mungkin akan menghalangi pemanfaatan alam seperti ini melalui penerapan sangsi-sangsi atau pembatasan pasar misalnya dengan melarang perdagangan spesies yang dilindungi.

Contoh lain adalah komunitas internasional telah mendorong desentralisasi di Indonesia untuk menjamin pemerataan pembangunan yang lebih luas. Reformasi ini telah mendapat dukungan luas dari para penggerak pembangunan lokal. Tetapi para penggerak pembangunan level nasional kadang-kadang enggan berpartisipasi dalam reformasi ini karena akan menghasilkan pergeseran struktur kekuasaan. Hal ini mungkin menggambarkan perlu adanya perhatian terhadap (dan mungkin terhadap kurangnya) ruang interaksi dan pembelajaran bersama yang bisa dikembangkan lagi dalam diskusi-diskusi atau penelitian-penelitian lebih lanjut. Dalam sebuah pertemuan antar kepala dewan perencanaan pembangunan pemerintahan 12

provinsi di kawasan Indonesia Timur¹⁹, sejumlah peserta menekankan pentingnya forum-forum yang lebih kecil karena pertemuan-pertemuan sejenis berskala nasional di Jakarta terlalu besar (dalam hal jumlah peserta) dan oleh karenanya aspirasi daerah sulit didengar apalagi dinegosiasikan.

Contoh-contoh ini adalah bagian dari kemajuan Indonesia sebagai sebuah Bangsa. Mereka menekankan pentingnya komunikasi yang lebih efektif antar penggerak pembangunan. Interaksi seperti ini dibutuhkan untuk membangun pengertian bersama tentang bagaimana kelompok-kelompok tersebut dengan paradigmanya masing-masing saling mempengaruhi. Interaksi yang semakin baik antar penggerak pembangunan lokal, nasional dan internasional dapat menciptakan kesamaan kerangka strategi-strategi komunikasi yang relevan bagi prioritas pembangunan masing-masing kelompok dan dapat meningkatkan kapasitas individu di setiap kelompok untuk mengerti isu-isu dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi kelompok lain. Penelitian-penelitian lebih lanjut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan adanya perbedaan-perbedaan paradigma dan perlunya negosiasi antar kelompok. Selama satu kelompok tidak mempunyai pengertian yang cukup terhadap rasionalitas yang membentuk paradigma kelompok lain, maka proses negosiasi yang efektif antar penggerak pembangunan dengan paradigma mereka yang berbeda-beda tidak akan pernah ada. Bila penggerak pembangunan internasional memaksakan perlunya pelaksanaan prinsip-prinsip yang dianggap "tidak rasional" oleh penggerak lokal dan nasional, sering hasilnya adalah sebuah proses pembangunan yang dipaksakan. Hal ini akan meningkatkan kecurigaan ter-

hadap dominasi eksternal dan sering menciptakan perlawanan dari masyarakat lokal meskipun sebenarnya mereka (penggerak nasional dan/atau internasional) mempunyai maksud baik.

Sekarang konteks paradigma pembangunan internasional sebagian besar tentang hak-hak asasi manusia dan lingkungan. Meningkatkan kesadaran tentang ketahanan hayati di Indonesia adalah hal yang penting dalam perspektif global karena pengaruh lingkungan Indonesia terhadap iklim global. Dukungan dari paradigma pembangunan nasional terhadap ketahanan hayati (terutama pengaruhnya terhadap ketahanan pangan) harus dibentuk dalam konteks stabilitas politik.

Aspek lain yang bisa dibentuk untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap ketahanan hayati pada level nasional adalah trend kompetisi global antar negara yang menuju pada ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan. Setiap negara yang berkompetisi di arena global harus meningkatkan skill, kapasitas dan teknologi²⁰ sebagai aset nasional. Tapi pengetahuan akan kekayaan besar sumber-sumber biologi yang ada dalam budaya Indonesia belum dilihat sebagai aset nasional yang penting. Pengetahuan ini harus dilihat sebagai sebuah bagian integral usaha Indonesia dalam menciptakan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Namun yang terjadi adalah tendensi untuk mengadopsi teknologi negara lain yang dalam banyak kasus tidak cocok dengan kapasitas lokal dan mengabaikan konteks lokal. Proses adopsi ini juga mengurangi kepercayaan diri kapasitas lokal yang mengandalkan teknologi-teknologi lokal dan berdampak pada modal sosial komunitas. Kehilangan kepercayaan diri dan kesatuan sosial seperti ini sangat berhubungan dengan stabilitas politik, dan oleh karena itu dapat dikaitkan dengan paradigma pembangunan nasional yang berorientasi pada kekuatan.

¹⁹ Pertemuan ini diadakan pada 27-28 February, 2008 di Ambon, Maluku, Indonesia dimana peserta berasal dari pemerintahan provinsi dan pemerintah pusat. Pertemuan ini diselenggarakan oleh Forum Kawasan Indonesia Timur dan didukung oleh Decentralization Support Facility, Eastern Indonesia (DSF-SoFEI)

²⁰ Lihat definisi Maholtra tentang aset ilmu pengetahuan (knowledge assets, 2003:6)

Dari perspektif paradigma pembangunan lokal, ketahanan hayati harus secara nyata bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan tindakan nyata untuk ketahanan pangan. Contohnya yang sedang diteliti oleh Dharma Palekahelu²¹ yang berfokus pada strategi daya tahan hidup masyarakat Desa Wangu²² yang setiap tahun menghadapi kekeringan parah dan telah membangun sistem kepercayaan yaitu *Marapu*, yang menekankan pada keseimbangan antara manusia dan alam, dan pengetahuan bahwa eksploitasi berlebihan akan menyebabkan alam menjadi "sakit". Ini hanya salah satu dari banyak contoh cara kerja yang menunjukkan kapasitas dan kesadaran lokal terhadap lingkungan.

Tuntutan terhadap Indonesia untuk melestarikan alamnya harus diimbangi dengan solusi yang dapat menggerakkan perekonomian yang menguntungkan bagi masyarakat setempat dengan memanfaatkan sumber-sumber lokal tanpa merusak sumber-sumber tersebut. Ini menekankan pada perubahan gaya hidup komunitas-komunitas yang secara tradisional hidup "dengan" lingkungan mereka yang sekarang berubah menjadi komunitas-komunitas yang hidup "dari" lingkungan mereka, memperbaiki sumber-sumber alam yang telah rusak. Dari perspektif pemberdayaan komunitas, penduduk asli telah menggunakan teknologi yang dikembangkan dari generasi ke generasi berdasarkan keadaan lingkungan mereka. Teknologi ini terintegrasi dalam identitas budaya lokal yang membentuk struktur sosial komunitas-komunitas lokal. Pengetahuan ini tentunya bisa dimantapkan oleh pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik dari luar, misalnya untuk meningkatkan produktivitas. Namun perlu diingat bahwa ada risiko sosial, ekonomi dan ling-

kungan yang sangat besar bila pengetahuan lokal dikesampingkan.

Memfasilitasi Kesadaran dan Pengetahuan tentang Ketahanan Hayati antara Paradigma-paradigma Pembangunan

FAO mendefinisikan ketahanan hayati sebagai berikut:

... sebuah pendekatan strategis dan terintegrasi yang mencakup kebijakan dan aturan-aturan (termasuk instrumen dan kegiatan) yang menganalisis dan mengelola resiko dalam sektor-sektor keamanan pangan, kehidupan dan kesehatan hewan, dan kehidupan dan kesehatan tanaman. Ketahanan hayati mencakup pengenalan terhadap hama tanaman, hama hewan, penyakit, dan ilmu hewan, pengenalan terhadap organisme-organisme modifikasi genetik (GMOs) dan produk-produknya, dan pengenalan dan manajemen serangan spesies asing dan jenis-jenis spesies. Ketahanan hayati adalah konsep menyeluruh yang mempunyai hubungan langsung dengan kesinambungan pertanian, keamanan pangan, dan perlindungan terhadap lingkungan termasuk keragaman hayati.²³

Definisi yang sangat sesuai di level internasional ini, mengalami dekadensi arti pada level nasional dan beresiko akan kehilangan arti bagi orang-orang lapangan yang berada pada konteks lokal jika definisi ini tidak dikomunikasikan berdasarkan praktik-praktik lokal untuk kesinambungan agrikultur, keamanan pangan dan perlindungan lingkungan di mana ketahanan hayati dianggap relevan dan penting dalam kehidupan sehari-hari.

Jika kita menerima bahwa komunitas-komunitas lokal harus diberdayakan dengan kesadaran bahwa negara tidak bisa selalu diandalkan untuk mengatasi masalah-masalah hama dan penyakit, maka sebuah pengertian

²¹ Presentasi sebelum penelitian (*Pre-research*) pada 3 April, 2008 pada Pusat Studi Kawasan Indonesia Timur, Universitas Kristen Satya Wacana

²² Lokasi desa ada di Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia

²³ <http://www.fao.org/biosecurity/web-site> untuk ketahanan hayati (*biosecurity*)

yang lebih besar terhadap lingkungan dan keragaman hayati adalah sebuah kunci dalam mengidentifikasi praktik-praktik pengetahuan lokal untuk mengatasi dan menghindari masalah-masalah hama dan penyakit dan bagaimana hubungannya dengan usaha-usaha global. Pengertian ini harus dibangun berdasarkan identitas-identitas lokal yang ada dan sumber-sumber pengetahuan komunitas-komunitas lokal.

Para fasilitator dan penggerak pembangunan masyarakat lain menghadapi tantangan untuk memberdayakan komunitas lokal agar bisa berperan aktif dalam proses pembangunan modern. Peran ini harus bisa meningkatkan kesadaran dan kepercayaan diri masyarakat dalam hal identitas dan kapasitas mereka. Para fasilitator harus mengidentifikasi dan mengenal pengetahuan dan teknologi sebagai hal penting untuk berinteraksi dengan potensi-potensi masyarakat yang dapat diperkuat dan dipercaya sebagai prioritas pembangunan dalam perspektif daerah dan lingkungan mereka. Fokus awal pada keamanan pangan menjadi sangat relevan dengan paradigma-paradigma pembangunan nasional dan lokal. Di tingkat nasional, meningkatkan dan memelihara keamanan pangan secara langsung berhubungan dengan kekuasaan karena keamanan pangan membantu menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Penekanan pada "koneksi" ini mendukung ketahanan pangan dan secara implisit juga mendukung program-program ketahanan hayati pada level nasional.

Di level lokal, pangan membentuk basis identitas komunitas dan sumber-sumber pengetahuan. Salah satu cara untuk memasyarakatkan ketahanan hayati pada level lokal adalah dengan berfokus pada isu-isu pergeseran konsumsi dari makanan pokok lokal ke makanan pokok "nasional". Sebuah penelitian baru-baru ini diadakan oleh World Bank (belum dipublikasikan) terhadap kebijakan beras Indonesia, mengungkapkan kenyataan bahwa belum ada sebuah penelitian nasional yang secara detail memisahkan peru-

bahan-perubahan trend konsumen di Indonesia yang berkaitan dengan beras. Belum ada juga analisis yang cukup yang dilakukan oleh berbagai penelitian-penelitian lokal terhadap ketahanan pangan²⁴, bukan hanya untuk mengukur dampak dari perubahan konsumen tapi juga untuk mengidentifikasi hilangnya sumber-sumber pengetahuan lokal yang berkaitan dengan berbagai macam makanan pokok regional, misalnya jagung di Nusa Tenggara, ubi jalar di dataran tinggi Papua dan lain-lain. Penelitian-penelitian semacam ini akan berguna untuk melihat apakah kebijakan-kebijakan beras nasional mempunyai efek negatif terhadap modal sosial penduduk lokal atau asli. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan diri terhadap sumber-sumber keragaman hayati lokal dan mengenalkan pengetahuan-pengetahuan itu kepada para peneliti nasional dan internasional merupakan tugas yang berat, namun perubahan kebijaksanaan pada level nasional dan internasional bisa menciptakan peluang untuk membangun sebuah strategi yang lebih efektif dalam melindungi dan memanfaatkan keanekaragaman hayati Indonesia yang besar.

PNPM sebagai Platform Ketahanan Hayati

PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) adalah proyek pembangunan sosial besar yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan tiga paradigma pembangunan di Indonesia. Dalam hal prinsip program ini bertujuan memberantas kemiskinan, meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok marjinal, mendukung beragam prinsip *good governance*, dan menyediakan platform untuk harmonisasi antar penggerak pembangunan internasional yang aktif di Indonesia. Dalam hal ini PNPM dilihat sebagai

²⁴ Contohnya studi yang dilaksanakan oleh CARE International (http://bakti.org/files/resourcesmodule/@random448cf120530b7/1175239087_Food_Security_Assessment_reportMarch_07_150307_ds.pdf)

sebuah program ideal yang pantas mendapat dukungan internasional.

Dari paradigma nasional, sumber-sumber pengetahuan yang ditransfer dari pemerintah ke masyarakat melalui program ini memberikan banyak keuntungan dalam hal pemberian dukungan terhadap pemerintah karena ribuan desa di seluruh Indonesia yang berpartisipasi dalam program ini telah menerima bantuan secara langsung.

Dari perspektif paradigma pembangunan lokal, program ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok desa. Implementasi program ini sangat tergantung pada para fasilitator yang direkrut atau ditunjuk oleh masyarakat desa menurut ruang lingkup kerja (antar atau dalam desa, kecamatan, atau kabupaten). Tugas fasilitator adalah membantu masyarakat lokal untuk berperan aktif dalam perencanaan, pengusulan, pelaksanaan, pengawasan dan/atau penilaian proses-proses pembangunan dalam komunitas mereka. Fasilitator membantu masyarakat dengan memperkuat sumber-sumber pengetahuan masyarakat dan meningkatkan kapasitas untuk berinteraksi dengan proses-proses pembangunan dan penggerak-penggerak dari luar.

Masalah dalam proses ini adalah banyak fasilitator lebih bersifat "manual", dan melaksanakan proses fasilitasi hampir seratus persen berdasarkan teori daripada mencari dan memanfaatkan adat istiadat dan norma-norma lokal. Hal ini menyebabkan implementasi yang "efektif" dalam hal manajemen waktu dan pendanaan. Namun "keefektifan" ini dapat juga memberikan dampak negatif terhadap modal sosial sebuah komunitas. Contohnya adalah dalam hal penyediaan air bersih yang secara langsung diberikan ke masyarakat memakan banyak waktu dan banyak energi masyarakat untuk mendapat air. Komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat yang terjadi di tempat pencucian atau sumur umum bisa menurun karena "pembangunan" ini. Para fasilitator harus tanggap akan

masalah ini dan metodologi yang telah dikembangkan untuk membantu para fasilitator harus lebih sensitif terhadap adat istiadat setempat. Pentingnya "sensitivitas" ini merupakan aspek-aspek ketahanan hayati dan ketahanan pangan yang perlu dimasukkan dalam PNPM.

Peran para fasilitator harus dilihat sebagai pintu gerbang pengetahuan dalam pembangunan. Dengan peran ini seorang fasilitator tidak hanya menyalurkan atau meneruskan pengetahuan ke masyarakat. Seorang fasilitator juga harus membantu sebuah komunitas memantapkan pengetahuan dan sumber-sumber identitas mereka, dan menganalisis pengetahuan ini dengan data dan informasi dari komunitas-komunitas lain. Praktik ini telah dilakukan oleh jaringan *Locally Managed Marine Areas (LMMA)*²⁵ di mana masyarakat dibantu dalam pengumpulan data sumber-sumber alam di daerah mereka. Spesies laut dan tumbuhan dicatat dan masyarakat dibuat sadar akan nilai ekonomi dari berbagai macam spesies tersebut. Masyarakat diajarkan tentang bagaimana memaksimalkan pendapatan berdasarkan teknik panen yang berkelanjutan yang sering dilakukan dengan upacara-upacara tradisional yang berorientasi pada pelestarian lingkungan²⁶.

Hasilnya, komunitas-komunitas yang berpartisipasi dalam LMMA telah berhasil meningkatkan pendapatan kotor mereka dan melindungi lingkungan hidup mereka. Mereka sangat sadar akan keberadaan sumber-sumber mereka. Hal ini juga telah meningkatkan modal sosial mereka yang disebabkan oleh peningkatan kepercayaan terhadap pengetahuan tradisional dan adat istiadat mereka. Dengan memanfaatkan metode-metode pengumpulan data, LMMA juga mem-

²⁵Mengacu pada website: http://www.immanetwork.org/Site_Page.cfm?PageID=38

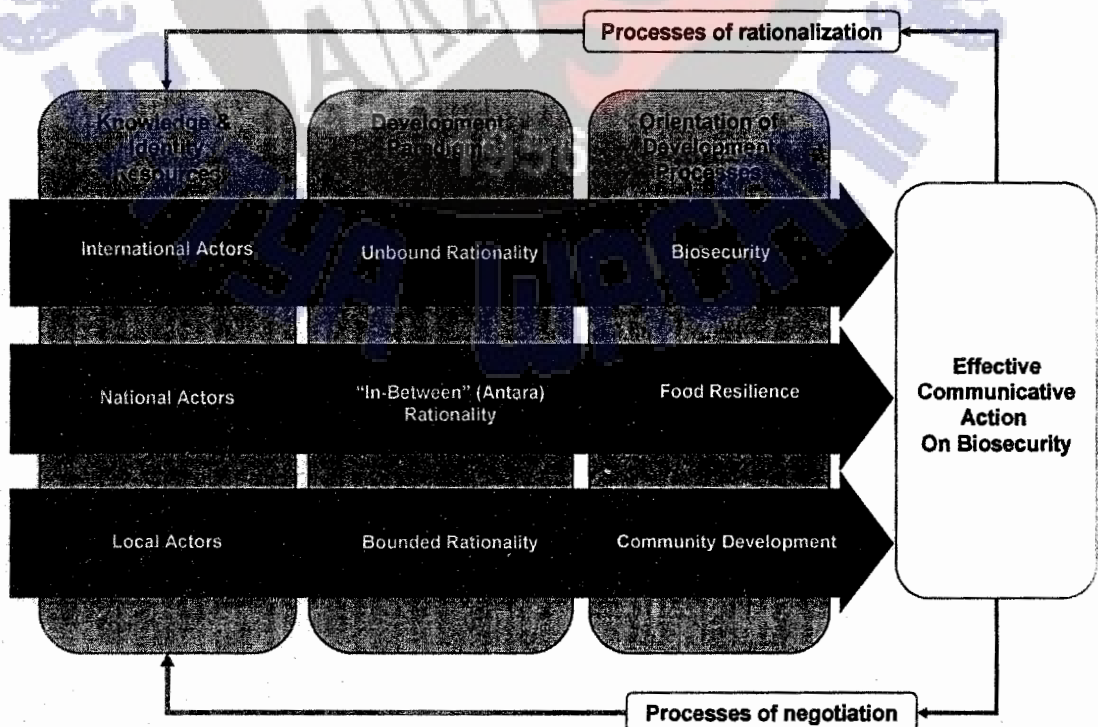
²⁶ Kebiasaan bersifat tradisional Sasi di Maluku dan Papua yang berhubungan dengan masa perkawinan dan pengembangbiakan species utama laut di masing-masing daerah

bantu para penggerak lokal untuk dapat berinteraksi dalam level nasional dan internasional. Dari pengalaman dan pendekatan-pendekatan seperti ini, para fasilitator PNPM sebagai pintu gerbang pengetahuan dapat membantu para pemangku kepentingan nasional dan internasional dengan memaksimalkan pengetahuan dan sumber-sumber identitas lokal.

Dari perspektif nasional, pendekatan-pendekatan ini memberikan kesempatan yang sangat luas untuk meningkatkan aset intelektual negara dan memberikan Indonesia data, informasi dan praktik-praktik pengetahuan yang dibutuhkan untuk bekerja sama dengan masyarakat internasional dalam rangka meneruskan program-program pelestarian dan perlindungan keragaman hayati negara. Masalah-masalah keragaman hayati dapat ditangani lebih cepat jika para fasilitator dan masyarakat diberi penjelasan

mengenai hama dan penyakit dan jika memungkinkan cara-cara tradisional yang efektif digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Terlebih lagi meningkatnya pengakuan akan peran masyarakat lokal atau asli dalam program pelestarian alam mendukung usaha-usaha untuk mengatasi masalah tanah-tanah tradisional dengan menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai agen-agen pelestarian alam dalam area tanah tradisional yang dipetakan melalui proses-proses fasilitasi. Diagram II mengadaptasi diagram sebelumnya untuk menunjukkan bagaimana dialog ketahanan hayati pada level internasional dihubungkan dengan ketahanan pangan atau dengan perspektif-perspektif pada level nasional dan kemudian dihubungkan dengan pembangunan masyarakat pada level lokal untuk interaksi efektif antar kelompok sehingga sebuah strategi yang relevan dengan semua pihak dapat dibangun.

Diagram II



Kesimpulan

Kesimpulan-kesimpulan ini adalah kesimpulan-kesimpulan awal karena kerja sama dan penelitian-penelitian lebih lanjut terhadap kegiatan komunikasi efektif dalam pembangunan masih diperlukan. Ini dapat dilakukan dalam rangka mendukung usaha-usaha bersama untuk mengatasi masalah-masalah pelestarian lingkungan Indonesia melalui ketahanan hayati dan ketahanan pangan sebagai isu yang melewati batas-batas paradigma pembangunan lokal, nasional dan internasional. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini umumnya berfokus pada elemen-elemen nyata pelestarian alam dan ketahanan hayati. Usaha-usaha selanjutnya harus berfokus pada elemen-elemen abstrak kekuasaan, prinsip, dan tujuan yang mendasari kegiatan penggerak pembangunan dan harus menjadi solusi yang relevan bagi perspektif yang dominan di setiap kelompok.

Agenda internasional pada saat ini adalah mengenai pemanasan global dan perubahan iklim yang harus menjadi agenda nasional menuju ketahanan pangan dan stabilitas politik. Pada saat yang sama agenda ini harus sesuai dengan prioritas pemangku kepentingan lokal dalam hal pengakuan dan pendapatan. PNPM memberikan sebuah platform yang dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan tiga paradigma pembangunan. Peran fasilitator masyarakat sebagai gerbang pengetahuan adalah faktor utama dalam komunikasi ini dan dalam interaksi efektif antar penggerak pembangunan lokal, nasional dan internasional.

Acara-acara untuk mengumpulkan para penggerak pembangunan lokal, nasional dan internasional untuk bermusyawarah tentang masalah-masalah seperti manajemen masyarakat dalam ketahanan hayati sangat penting untuk dilakukan karena acara-acara tersebut dapat memberikan masukan-masukan berharga untuk kegiatan terpadu antar semua

pihak terkait dan merupakan sebuah tempat berinteraksi bagi para peserta acara tersebut. Tulisan ini menekankan pada **apa** dan **bagaimana** masalah-masalah dan pendekatan-pendekatan dikomunikasikan, bukan hanya dalam hal media apa yang digunakan tapi juga dalam hal keharusan pelaksanaan konsep-konsep tersebut untuk mengakomodasi rasionalitas dan paradigma para penggerak pembangunan di Indonesia jika kita ingin melakukan apa yang telah kita katakan.

Taro Ada, Taro Gau.

References:

- BAPPENAS, 2003. *Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia/ Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan - IBSAP (English Version)*. Jakarta, <http://www.bappenas.go.id/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=823> (Accessed 10/04/2008)
- Barrett, M., 1991. *The Politics of Truth: From Marx to Foucault*. Cambridge: Polity Press
- Chambers, R., 1994. *Challenging the Professions: Frontiers for Rural Development*. London: Intermediate Technology Publications.
- Kieft, J. and Soekarjo, D., 2007. *Food and nutritional security assessment March 2007: Initial impact analysis of the 2006/2007 crop season in comparison to 1997/1998 and 2002/2003 El Nino events for the Eastern NTT region*. CARE International Indonesia. <http://www.bakti.org/index.php?action=view&id=165&module=resourcesmodule&src=%4Orandom448cf120530b7> (Accessed 10/04/2008).
- Christie, M. and Greatorex, J., 2006. *Yolngu Life in the Northern Territory of Australia: The Significance of Community and Social Capital*. Inter-Networking Communities (INC) Charles Darwin University, Darwin <http://www.cdu.edu.au/centres/inc/pdf/SocialCapital.pdf> (Accessed 10/04/2008).
- Falk, I., 2001. *Human and Social Capital: A Case Study of Conceptual Colonisation*. CRLRA Discussion Paper. Presented at the CRLRA Seminar, 30 Oktober, 2000. Tasmania: University of Tasmania.

- Foucault, M., 1977. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*.
- Ed. Grillo, R.D. and Stirrat, R.D., 1997. *Discourses of Development*. Oxford UK: Oxford International Publishers Ltd.
- Geertz, C. & Geertz, H., 1975. *Kinship in Bali*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Habermas, Jürgen, 1987. *The Theory of Communicative Action*, trans. by Thomas McCarthy (2 vols) Cambridge: Polity Press.
- Iida, A., 2004. *Paradigm Theory and Policy Making*. North Clarendon VT, Tuttle Publishing.
- Kuhn, T., 1962. *The Structure of Scientific Revolutions*. Reprinted Chicago: University of Chicago Press, 1996. <http://science.jrank.org/pages/10603/Paradigm-BIBLIOGRAPHY.html> (Accessed 10/04/2008).
- Jorgensen, M. dan Phillips, L., 2007. *Analisis Wacana, Teori dan Metode*. (Translated by: Imam Suyitno, et. al.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartodihardjo & Jhamtani (Ed.), 2006. *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing.
- King, K., 2004. *Development Knowledge and The Global Policy Agenda. Whose Knowledge? Whose Agenda?* Occasional Paper - Centre of African Studies, University of Copenhagen.
- Kuipers, C. J., 1998. *Language, Identity and Marginality in Indonesia: The Changing Nature of Ritual Speech on the Island of Sumba*. Cambridge UK: Cambridge University Press.
- Latour, B., 1996. *Aramis, or the love of technology*, translated by Catherine Porter. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Long, N., 1992. *Battlefields of knowledge: the interlocking of theory and practice in social research and development*. London/New York: Routledge Press.
- Maholtra, Y., 2003. *Measuring Knowledge Assets of a Nation: Knowledge Systems for Development*. New-York, UN Headquarters. Research Paper <http://www.kmnetwork.com/KnowledgeManagementMeasurementResearch.pdf> (Accessed 10/04/2008).
- Lewis, D. and Mosse, D. (Eds.), 2006. *Development Brokers and Translators: The Ethnography of Aid and Agencies*. Bloomfield CT. Kumarian Press, Inc.
- Patel, K., 2006. *The Master Strategist - Power, Purpose and Principle*. London: Arrow Books.
- Sardan, J., 2005. *Anthropology and Development: Understanding Contemporary Social Change*. London: Zed Books Ltd.
- The World Bank, 2001. *Indonesia - Environmental and Natural Resource Management in a Time of Transition*. Washington: World Bank.
- Todaro, M., & Smith, S., 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga - Edisi kedelapan* (Indonesian Edition: Economic Development in the Third World - 8th Edition), Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Valdes, M., 1991. *A Ricoeur Reader: Reflection and Imagination*. Toronto and Buffalo, University of Toronto Press.